



▶ KESEJAHTERAAN GURU

Sekolah Swasta Kesulitan Dongkrak Gaji Honorer

Lugas Suberkah, Yusuf Leon, & Ujang Hasmudin
rdakals@harianjogja.com

SLEMAN—Sekolah swasta mengaku kesulitan menggaji guru honorer setara dengan upah minimum provinsi. Mereka berharap pemerintah daerah memberikan bantuan agar guru honorer lebih sejahtera.

Kepala SMK Muhammadiyah Cangkringan, Dwi Gunarto, menjelaskan terkait dengan wacana gaji guru honorer sesuai UMP, menurutnya tidak masalah jika ada dukungan dana dari Pemda DIY.

"Kalau sumber gajinya jelas memang karena kalau dari sekolah sendiri kemampuan sekolah berbeda-beda," ujarnya, Jumat (26/11).

▶ Halaman 6

Sekolah Swasta...

Ia menjelaskan sumber dana ini tidak harus 100%, tetapi bisa berupa subsidi, sehingga dapat membantu kemampuan sekolah dalam menggaji guru honorer sesuai UMP. "Mungkin ada apa lah dari pemda mungkin berupa atau sebulan berupa semacam subsidi," katanya.

Dengan persentase yang lebih besar, ia juga berharap Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat dialokasikan untuk gaji guru honorer.

Dia mengungkapkan di SMK Muhammadiyah Cangkringan hampir semuanya guru honorer dengan status tetap Yayasan dan ada honorer tidak tetap. Untuk guru honorer tetap, menurutnya, terkait dengan gaji tidak begitu bermasalah.

Saat masih dikelola oleh Pemkab Sleman, sempat ada semacam subsidi untuk gaji guru honorer, sekitar Rp300.000-Rp400.000 sehingga membantu sekolah. Namun ketika SMA-SMK pengelolaan berpindah ke Pemda DIY, subsidi masih ada namun sangat terbatas.

Kepala SMK Maarif Tempel Atik Sunaryati, mengakui belum siap jika harus memberi gaji guru honorer sesuai UMP. Hal ini dikarenakan saat ini pemasukan sekolah belum maksimal dan bantuan pemerintah juga masih minim. "Belum mampu karena masukan untuk sekarang belum dapat maksimal dan jumlah siswa belum penuh. Bantuan pemerintah untuk siswa swasta belum cukup sesuai biaya pendidikan SMK," ungkapnya.

Anggaran Terbatas

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Bantul akan memperjuangkan insentif guru honorer di Bumi Projo Tamansari agar sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK). Namun perjuangan itu butuh waktu dan tidak memungkinkan diterapkan pada 2022 mendatang karena anggaran tahun depan sudah dibahas.

Kepala Disdikpora Bantul, Isdarmoko, mengakui insentif guru honorer di Bantul saat ini terendah masih 1,5 juta per bulan yang diberikan setiap tiga bulan. Nilai insentif tersebut sudah berlangsung sejak 2019 lalu saat UMK Bantul masih Rp1.649.800. Sementara UMK Bantul 2022 kini menjadi Rp1.916.846.

Menurut Isdarmoko, insentif guru honorer masih belum naik tahun ini karena kondisi keuangan daerah yang belum memungkinkannya. "Tindak lanjutnya akan koordinasi dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperjuangkan," kata Isdarmoko.

Isdarmoko menyatakan insentif guru honorer tahun depan sudah di-entry sejak Juli lalu dan tidak memungkinkan lagi diubah. Paling memungkinkan kenaikan insentif guru honorer pada 2023. Itu pun harus dibahas bersama TAPD dan DPRD.

Sebagaimana diketahui insentif untuk guru maupun pegawai honorer di bidang pendidikan bervariasi tergantung tahun mengajar. Namun paling tinggi adalah Rp1,5 juta per bulan yang dibayarkan tiap tiga bulan untuk honorer yang SK pengangkatannya maksimal sampai 2005 lalu yang disebut honorer kategori 2 (K2) atau honorer grade satu. Sedangkan honorer grade dua yang SK pengangkatannya sampai 2007 sebesar Rp1 juta per bulan. Selanjutnya honorer grade tiga atau dengan SK pengangkatan 2008-2013 mendapatkan Rp400.000 per bulan. Honorer grade empat dengan SK pengangkatan 2014-2018 sebesar Rp350.000. Nilai insentif tersebut hanya untuk honorer di sekolah negeri.

Sementara honorer yang bekerja di sekolah swasta diberi bantuan oleh Pemkab Bantul meski tidak sebesar insentif di instansi negeri. Rincian insentif honorer swasta untuk grade satu Rp650.000, grade dua Rp500.000, grade tiga Rp300.000, dan grade empat Rp250.000.

Payung Hukum

Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji, mengatakan untuk semua guru honorer yang dipekerjakan Pemda telah diberikan minimal sesuai UMK. "Dan itu ada aturannya. Peraturan Gubernur (Pregab 74/2019 tentang Pengelolaan Tenaga Bantu)," katanya, Jumat.

Selain itu, Aji juga mengakui sejauh ini tidak ada kendala dalam anggaran. "Sudah ada buffer-nya. Untuk saat ini tenaga bantu kami juga sudah di atas dari UMK kota," ucap Aji.

Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Jogja, Dedi Budiono, mengatakan seluruh guru tidak tetap yang mengajar di sekolah negeri baik SD maupun SMP di wilayah setempat telah mendapatkan upah setara dengan upah minimum provinsi (UMP).

"Penetapan upah kami minimal UMP DIY, jadi kalau pengangkatan berdasarkan skema yang dilakukan dinas itu upahnya UMP, bahkan yang diangkat sekolah negeri itu standar gaji juga sama," katanya, Jumat.

Hanya saja, Dedi mengakui upah guru tidak tetap yang berada di sejumlah sekolah swasta atau milik Yayasan di Kota Jogja sulit diawasi. Skema pengajian guru tidak tetap di sejumlah sekolah swasta atau milik yayasan memang diatur oleh masing-masing sekolah sesuai kemampuan keuangan sekolah.

"Yang sulit memang pengawasan GTT yang di swasta atau Yayasan. Itu kan di luar jangkauan kami. Kami juga tidak bisa memaksa harus gaji sekian, karena mereka juga punya hitungan sesuai kemampuan anggarannya. Kalau sekolah negeri kami pastikan UMP," katanya, kemarin.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005